

BAB IV

FAKTOR PEMICU PENINGKATAN KERJA SAMA JEPANG DENGAN QUAD

Pembicaraan mengenai perjanjian keamanan segi empat antara AS, Jepang, Australia, dan India kembali mencuat setelah sejumlah petinggi dari keempat negara tersebut mengadakan dialog di sela-sela pertemuan KTT ASEAN di Manila pada tahun 2017. Hal tersebut didorong atas kekhawatiran keempat negara tersebut dengan semakin besarnya pengaruh dan kekuatan Tiongkok yang dapat mempengaruhi kawasan Indo-Pasifik (Unjhawala, 2018). Sejumlah pihak telah memandang bahwa Tiongkok cukup agresif di kawasan Laut Tiongkok Selatan dan Laut Tiongkok Timur. Selain itu, sejumlah pihak juga menganggap bahwa Tiongkok telah membangun militer yang kuat untuk dapat mewujudkan dan mempertahankan kepentingan strategisnya di kawasan. Secara tidak langsung, sejumlah pihak menganggap bahwa meningkatnya kekuatan militer Tiongkok telah menjadi ancaman yang nyata. Namun, Tiongkok menegaskan bahwa membangun militer yang kuat memang dibutuhkan untuk mempertahankan negaranya dari ancaman negara maupun pihak lain dan untuk melindungi kepentingannya.

Dengan meningkatnya permintaan energi yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat, Tiongkok digadang-gadang dapat menjadi importir energi terbesar di dunia. Bagi Tiongkok, pasokan energi yang aman dan berkelanjutan adalah kunci dari keamanan nasional. Maka dari itu, rute maritim yang bebas dan aman di kawasan Samudera Pasifik dan Hindia menjadi kunci jalur perdagangan Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, keterlibatan AS yang lebih aktif di sekitar Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan, Laut Tiongkok Timur, hingga Samudera Hindia telah menjelaskan

tekanan AS yang coba diberikan terhadap Kebijakan Luar Negeri Tiongkok di wilayah yang luas. Langkah Tiongkok yang semakin aktif dengan inisiatif BRI telah menyiratkan bahwa negara tersebut mencoba menunjukkan dominasinya di kawasan Indo-Pasifik (Saeed, 2017).

Mengingat peningkatan strategis di kawasan Indo-Pasifik, Tiongkok telah mengambil upaya berkelanjutan untuk mengamankan jalur perdagangannya dan mengkonsolidasikan pengaruh regionalnya. Secara khusus, Tiongkok mengusulkan BRI (*Belt and Road Initiative*) pada tahun 2013 lalu yang mencakup “*Silk Road Economic Belt*” dan “*21st-century Maritime Silk Road*”. Hal tersebut merupakan upaya Tiongkok untuk membangun kembali jalur sutra perdagangan yang menghubungkan kawasan Asia dengan Afrika dan Eropa melalui pembangunan infrastruktur berupa pelabuhan. Upaya Tiongkok tersebut dilakukan untuk meningkatkan investasi dan kerja sama dengan negara-negara yang telah dihubungkan dengan inisiatif BRI. Jika hal tersebut terwujud, maka dapat dengan mudah menghubungkan Tiongkok ke lingkaran perdagangan Asia-Pasifik di sebelah timur dan perdagangan Eropa di sebelah barat.

Tiongkok memanfaatkan jalur sutera tersebut sebagai sarana mempromosikan dirinya agar dapat memainkan peran yang menentukan dalam proses integrasi di kawasan Eurasia. Proyek ini bersifat inklusif, di mana akan ada ruang untuk semua jenis rezim dan aktor politik, baik negeri maupun swasta, dan menawarkan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek ini. Tiongkok yakin bahwa penerapan rencana ini dapat membantu mengamankan berbagai tujuan utama dalam kebijakan dalam maupun luar negeri. Pemerintah Tiongkok mempunyai pandangan bahwa program ini dapat membantu hubungan kerja sama ekonomi, politik, dan budaya dengan negara-negara lain yang terlibat dalam program ini. Pemerintah Tiongkok telah memprediksi bahwa perdagangan dengan negara-negara Eurasia pada tahun 2013 dapat

mencapai nilai 1,25 triliun dolar AS dan akan berlipat ganda pada tahun 2020 (Esteban & Otero-Iglesias, 2015).

Tiongkok merasa perlu untuk mengelola pasokan energi agar tidak terputus dan aman. Pasokan energi Tiongkok yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah dan Afrika Utara berusaha dikirimkan ke Tiongkok melalui jalur maritim (Cheema & Aggarwal, 2016). Untuk mengamankan pasokan energinya di Samudera Hindia, Tiongkok telah menanamkan investasinya untuk pembangunan infrastruktur berupa pelabuhan ke sejumlah negara, seperti di Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, dan Myanmar. Berbagai pendapat muncul menanggapi upaya Tiongkok dalam BRI. Inisiatif Tiongkok disebut-sebut tidak hanya difokuskan pada tujuan ekonomi, namun juga bertujuan untuk meningkatkan pengaruh strategis Tiongkok. Dokumen pertahanan Tiongkok yang dirilis, mengungkapkan bahwa Tiongkok akan fokus untuk mengamankan kepentingan luar negeri dengan meningkatkan kekuatan militer negaranya di berbagai lokasi (Huanqiu, 2015). Untuk itu, Tiongkok telah mendirikan basis logistik militer di Djibouti dan melakukan latihan militer dengan Pakistan, mengirim kapal selam dan kapal perang ke Pelabuhan Gwadar di Pakistan (Brewster, 2017). Bagi Tiongkok, Gwadar telah menjadi pelabuhan yang strategis dan penting karena menjadi jalur BRI.

Tiongkok telah membangun CPEC atau “*China-Pakistan Economic Corridor*” yang akan menghubungkan sejumlah provinsi di bagian barat Tiongkok (Kashgar) dengan Gwadar di Pakistan. CPEC mencakup beragam proyek infrastruktur termasuk pembangunan jalan raya, kereta api, jaringan pipa dan optik, dan lain sebagainya. Tiongkok mengklaim bahwa CPEC tidak hanya akan menguntungkan bagi Tiongkok, namun juga bagi Pakistan sendiri dan sejumlah negara lainnya. Hal tersebut dikarenakan CPEC diklaim dapat mempermudah jalur perdagangan baru untuk negara-negara di kawasan Asia Tengah lainnya.

Langkah cepat yang diambil oleh Tiongkok untuk memperluas jalur perdagangannya telah membuat sejumlah negara khawatir. Negara-negara seperti Jepang, AS, India, hingga Australia juga merasakan kekhawatiran yang sama. Maka dari itu, terbentuknya kembali Quad telah memunculkan harapan baru bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya. AS sebagai salah satu negara yang terlibat dalam Quad percaya bahwa Quad dapat menjadi salah satu elemen strategi Indo-Pasifik yang lebih kuat untuk dapat mewujudkan kawasan yang bebas dan terbuka dan untuk menghadapi Tiongkok yang semakin agresif dan ekspansif di kawasan Indo-Pasifik (Pandit, 2018). Untuk memperkuat kerja sama antar negara Quad dalam meredam pengaruh Tiongkok tersebut, maka dibutuhkan pula kerja sama militer yang kuat antar masing-masing negara yang terlibat. Salah satu pejabat senior AS, Alice Wells mengatakan bahwa Quad juga menjadi sebuah wadah bagi negara-negara yang mempunyai visi untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong Jepang untuk kembali menyerukan kerja sama dengan Blok Quad. Sejumlah alasan tersebut didominasi oleh peran dan sikap Tiongkok yang semakin agresif di berbagai kawasan. Berbagai bentuk ancaman Tiongkok tersebut antara lain di dasari oleh kebangkitan Tiongkok dalam bidang ekonomi dan militer yang lantas dapat memperkuat peran dan posisi Tiongkok di kawasan.

A. Kepentingan Jepang di Indo-Pasifik

Untuk menghadapi langkah Tiongkok yang semakin aktif dalam merealisasikan inisiatif BRI, Jepang telah mengusulkan dialog tingkat tinggi dengan AS, India, dan Australia. Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono menyatakan bahwa tujuan diadakannya dialog tersebut adalah agar keempat negara dapat mempromosikan perdagangan bebas dan meningkatkan hubungan kerja sama pertahanan yang melintasi Laut Tiongkok Selatan,

Samudra Hindia, hingga ke Afrika (Saki & Yosuke, 2017). Tujuan lain diadakannya dialog keamanan tersebut adalah untuk menangkal ekspansi maritim Tiongkok yang semakin agresif di bawah inisiatif BRI. Tiongkok mempunyai rencana besar untuk memperkuat dan memperluas pengaruhnya di luar kawasan Asia. Untuk dapat merealisasikan pertemuan tersebut, Kono telah bertukar pikiran dengan Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson dan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop.

Pada pertemuan KTT G-20 di Hamburg pada Juli 2017 lalu, Abe telah memberikan sinyal bahwa Jepang bersedia untuk mengambil peran penting untuk menghadapi rencana pembangunan ekonomi Tiongkok dalam BRI yang semakin ambisius. Keputusan pemimpin Jepang tersebut didorong oleh kekhawatiran bahwa perusahaan-perusahaan domestik Jepang yang akan kehilangan proyek-proyek konstruksi yang menguntungkan, ketika proyek “Jalan Sutra” yang membentang dari Asia Tenggara, Asia Tengah, hingga Timur Tengah berhasil direalisasikan (Ryall, 2017).

Saat ini Jepang telah berada di masa untuk berperan lebih aktif lagi secara diplomatis dan membentuk strategi yang matang. Gagasan tersebut muncul setelah Tiongkok berusaha memperluas pengaruhnya. Maka dari itu, ide mengenai zona maritim yang damai dari Asia ke Afrika perlu untuk diwujudkan. Untuk mewujudkan zona maritim yang bebas dan terbuka tersebut, Jepang berusaha menggandeng AS, India, dan Australia. Jepang berharap untuk dapat memainkan peran kunci, tidak hanya di antara mitra dialog dan kolaborator, tetapi juga dalam memastikan terwujudnya kebebasan navigasi di perairan yang meliputi Laut Tiongkok Selatan, di mana saat ini Tiongkok telah menerjunkan kekuatan militernya di kawasan tersebut.

Abe pernah mengemukakan visi untuk mewujudkan jaringan perdagangan di kawasan Indo-Pasifik dalam pidatonya di depan Parlemen India yang berjudul “*Confluence of the Two Seas*” pada 2007 silam. Jaringan perdagangan tersebut akan terbuka dan transparan, memudahkan arus perdagangan, barang, modal, pengetahuan, hingga tenaga kerja mengalir bebas dalam kerangka “busur kebebasan dan kemakmuran” (Mukherjee, 2017). Gagasan Abe untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka tersebut juga mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah dukungan dari Menteri Luar Negeri AS, secara eksplisit menyatakan bahwa kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka perlu untuk diwujudkan. Dukungan yang muncul dari sejumlah pihak tersebut akhirnya menguatkan tekad Jepang untuk meningkatkan hubungan kerja samanya dengan Quad.

Kerja sama yang berusaha ditawarkan Jepang dan Quad di bawah kerangka Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, dirasa lebih realistis dan tidak menekan negara-negara yang menerima investasi tersebut. Kerja sama tersebut ditujukan untuk melatih bakat-bakat lokal untuk dapat meningkatkan ekonomi lokal. Sedangkan proyek BRI dianggap lebih memprioritaskan keuntungan bagi Tiongkok, seperti halnya untuk dapat mendapatkan hak penambangan mineral berharga atau menggunakan investasinya untuk menekan negara-negara agar lebih berpihak pada rezim Tiongkok dalam urusan diplomatik (Era Baru, 2018).

Tujuan yang melekat dalam visi Indo-Pasifik ada tiga (Mukherjee, 2017), yaitu:

1. Menegakkan prinsip-prinsip tatanan regional berbasis aturan, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa wilayah maritim.

2. Mempromosikan perdagangan bebas dengan meliberalisasi rezim perdagangan regional dan mempromosikan kebebasan navigasi.
3. Memberikan jaminan keamanan kepada negara-negara yang lebih kecil, khususnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Timur.
4. Negara-negara Quad bersedia memberikan bantuan untuk memastikan kebebasan dan keterbukaan di wilayah tersebut.

Namun, visi di atas sulit untuk diwujudkan sejak ambisi Tiongkok untuk merealisasikan inisiatif BRI yang semakin besar. Tidak hanya Tiongkok yang semakin tegas mengenai kepentingan intinya di kawasan tersebut, tetapi Tiongkok juga berusaha untuk mengembangkan kemampuan militer dan ekonominya dengan cepat selama periode ini. Inisiatif BRI telah mendorong Tiongkok untuk menyebarkan pengaruh tersebut ke berbagai wilayah.

Maka dari itu, untuk dapat mengimbangi pengaruh Tiongkok yang cukup agresif tersebut, Jepang perlu untuk memperkuat posisi negaranya. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan pihak lain yang memiliki kekuatan yang sama atau bahkan lebih besar. Menjalinkan kerja sama dengan negara yang mempunyai kekuatan lebih besar pun tidak cukup. Jepang harus dapat menggandeng negara-negara yang mempunyai pandangan yang sama dengan Jepang, yaitu untuk dapat menghadapi pengaruh Tiongkok yang semakin agresif dalam bidang ekonomi maupun militer dalam mewujudkan inisiatif BRI nya tersebut. Dengan alasan tersebut Jepang akhirnya menghidupkan kembali kerja sama Quad dengan AS, India, dan Australia.

Kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok yang terus meningkat telah dipandang menjadi ancaman bagi negara-negara di kawasan. Komitmen Tiongkok untuk meningkatkan peran internasionalnya telah mendorong

negara tersebut untuk mempertahankan pengaruh strategis dan kepentingan mereka di kawasan Indo-Pasifik, baik secara politik maupun militer. Untuk merespon keadaan tersebut, Jepang yang menjadi salah satu negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik dan mempunyai keinginan untuk dapat menjadi aktor yang berperan di kawasan tersebut, telah mengambil sikap pro-aktif dan waspada terhadap perkembangan regional di kawasan tersebut. Jepang berusaha untuk mempertahankan stabilitas dan mewujudkan perdamaian di kawasan tersebut dengan perannya di bidang ekonomi, keamanan, dan politik (Yani, 2010).

Salah satu upaya Jepang untuk merespon keadaan di kawasan Indo-Pasifik tersebut adalah berusaha menetapkan strategi “*Free and Open Indo-Pacific*” (FOIP) atau strategi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Dalam pidatonya di depan Majelis Umum PBB pada 25 September 2018, Abe menjelaskan bahwa Jepang akan berusaha menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah perairan maupun udara yang mencakup Samudera Antartika hingga Laut Jepang, melalui kawasan Saumudera Pasifik hingga Samudera Hindia (Era Baru, 2018). Dengan FOIP, Jepang berusaha meningkatkan konektivitas antara Asia dan Afrika melalui Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, dengan melibatkan ASEAN sebagai aktor untuk meningkatkan stabilitas dan kemakmuran di kawasan tersebut. Abe berharap bahwa sejumlah negara di kawasan tersebut harus bersatu dan bekerja sama untuk dapat mewujudkan strategi FOIP tersebut dan untuk dapat terlibat dalam kerja sama ekonomi berdasarkan aturan hukum.

Dalam publikasi mengenai politik luar negeri baru Jepang (Mission of Japan to ASEAN, 2016) disebutkan bahwa strategi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka terdiri dari tiga pilar, yaitu:

1. Promosi dan penegakan aturan hukum, kebebasan navigasi, dan perdagangan bebas. Dalam pilar ini, Jepang berusaha meningkatkan kerja sama dengan AS, India, Australia, ASEAN, negara-negara di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Selain itu, komunikasi strategis antar negara-negara di kawasan tersebut berusaha untuk ditingkatkan.
2. Mengejar kemakmuran ekonomi. Pada pilar kedua ini, berusaha mewujudkan peningkatan konektivitas melalui pengembangan infrastruktur, seperti halnya pembangunan pelabuhan dan jalur kereta api. Dalam hal ini, konektivitas di kawasan ASEAN berusaha dibangun. Inisiatif tersebut berusaha untuk membangun jalur kereta api dari Yangon hingga Mandalay di Myanmar. Sedangkan di koridor industrial juga berusaha dibangun di Delhi dan Mumbai. Selain di kawasan Asia, FOIP juga berusaha merambah kawasan Afrika dengan membangun Koridor Nacala, yang mencakup tiga negara, yaitu Malawi, Zambia, dan Mozambik. Selain berusaha meningkatkan konektivitas dan pembangunan infrastruktur, pada pilar ini juga ditujukan untuk memperkuat kemitraan ekonomi (termasuk perjanjian investasi).
3. Komitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan. Pada pilar terakhir ini, berusaha untuk mengembangkan kapasitas untuk negara-negara di pesisir Indo-Pasifik dengan memperkuat hukum maritim hingga pengembangan sumber daya manusia di kawasan tersebut. Kerja sama di bidang bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana akan ditingkatkan. Selain itu, dalam kerangka FOIP akan ditingkatkan kerja sama dalam bidang anti-pembajakan, anti-terorisme, dan non-poliferasi.

Pilar besar FOIP tersebut merupakan bentuk kemitraan Jepang dengan India di bawah kerangka *Asia-Africa Growth Corridor* (AAGC). Kerangka koridor pertumbuhan tersebut pertama kali diusulkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe dan Narendra Modi pada tahun 2016 lalu. AAGC berusaha mempromosikan aktivitas ekonomi maritim antara Jepang, India, negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dan juga Oseania. Selain mencakup rencana pembangunan infrastruktur, AAGC juga mempunyai rencana untuk melatih sejumlah buruh lokal yang terlibat untuk mendapatkan sejumlah keterampilan yang lebih memadai. Dengan demikian, secara tidak langsung, India telah berkomitmen untuk menjadi mitra utama Jepang. Hal tersebut juga dilandasi alasan karena India telah menentang proyek BRI Tiongkok. Penentangan India tersebut disebabkan karena proyek BRI dengan Pakistan atau CPEC telah melalui wilayah Kashmir yang disengketakan oleh India.

Penentangan terhadap proyek BRI juga disuarakan oleh Australia dan AS. Hal tersebut dibuktikan oleh komitmen kedua negara untuk lebih meningkatkan kerja sama trilateral dengan Jepang. Ketiga negara sepakat untuk menandatangani pakta trilateral untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur di kawasan tersebut. Kemitraan yang terjalin antar ketiga negara tersebut akan berfokus pada sektor-sektor transportasi, pariwisata, energi, dan infrastruktur teknologi.

Persaingan antara Tiongkok untuk dapat mewujudkan ambisinya melancarkan proyek BRI dengan upaya yang diambil Jepang dengan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Blok Quad telah menjadi bukti nyata bahwa di kawasan Indo-Pasifik sedang terjadi persaingan antar sebuah negara dan sebuah kelompok untuk dapat mempertahankan kepentingannya di kawasan Indo-Pasifik. Hal tersebut dapat berdampak pada

perubahan situasi keamanan maupun politik yang ada di kawasan tersebut.

B. Kebangkitan Tiongkok

Tiongkok telah mengalami pertumbuhan prekonomian yang cukup pesat yang lantas mengakibatkan Tiongkok mempunyai kekuatan militer yang besar pula.

1. Kebangkitan Ekonomi Tiongkok

Sebelum memulai reformasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan, Tiongkok mempertahankan kebijakan yang mengakibatkan perekonomian negaranya miskin, stagnan, tidak efisien, dan relatif terisolasi dari ekonomi global. Namun, setelah negara tersebut melaksanakan reformasi pasar bebas pada tahun 1979, Tiongkok muncul menjadi salah satu negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi tercepat, dengan rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 9,5% hingga tahun 2017 (Morrison, 2018). Dari tahun 1979 hingga tahun 2017, PDB Tiongkok tumbuh pada tingkat tahunan rata-rata sebesar 10%. Menurut Bank Dunia, Tiongkok telah berhasil mengentaskan sedikitnya 800 juta orang dari kemiskinan (World Bank, 2017). Tiongkok muncul sebagai kekuatan ekonomi global utama. Liberalisasi perdagangan dianggap menjadi salah satu kunci utama keberhasilan peningkatan ekonomi Tiongkok. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menarik investor asing dalam menanamkan modalnya di Tiongkok.

Upaya Tiongkok untuk memperluas pengaruh ekonominya secara global, salah satunya ditempuh dengan membangun kembali jalur sutera perdagangan dengan inisiatif BRI. Ambisi kuat Tiongkok untuk menghidupkan kembali kejayaan ekonomi seperti

masa lalu, telah mendorong Presiden Xi Jinping menginisiasi agar jalur sutera dalam kerja sama perdagangan lintas benua dapat terwujud. Gagasan mengenai BRI tersebut pertama kali dicetuskan oleh Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang pada tahun 2013 lalu (Esteban & Otero-Iglesias, 2015).

Tujuan utama dari BRI adalah untuk memperkuat konektivitas Tiongkok dengan negara-negara di kawasan Asia, Eropa, dan Afrika (NDRC, 2015). BRI mencoba menghubungkan lingkaran ekonomi Asia Timur yang dinamis di satu ujung dan mengembangkan lingkaran ekonomi Eropa di ujung yang lainnya, serta mencakup negara-negara dengan potensi besar untuk pengembangan ekonomi. Strategi tersebut berdampak baik bagi Tiongkok karena negara tersebut dapat mengambil peran yang cukup besar dalam sejumlah urusan global dengan menciptakan sebuah jaringan perdagangan yang melintasi batas benua dan berpusat di Tiongkok (Wo-Lap, 2016).

BRI memiliki dua inisiatif utama, yaitu *Silk Road Economic Belt (SREB)* dan *Maritime Silk Road (MRB)* (Nataraj & Sekhani, 2015). SREB merupakan jalur darat di mana fokusnya adalah untuk menghubungkan negara-negara dengan jalur kereta api. Sedangkan MSR adalah jalur laut yang menghubungkan sejumlah negara dengan pelabuhan, yang antara lain menghubungkan wilayah pantai Tiongkok dengan sejumlah negara di Kawasan Asia Tenggara, Benua Afrika, Samudera Hindia, dan tentu saja wilayah Laut Tiongkok Selatan. OBOR dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Tiongkok untuk membangun sekaligus mempererat kerja sama antar sejumlah negara yang berada dalam jalur *belt* dan *road* tersebut. Fokus utama dari BRI adalah proyek investasi yang dirancang untuk mempromosikan aliran

barang, investasi, dan manusia. Selain itu, BRI dimaksudkan untuk memperkuat fasilitas perdagangan, agar dapat menghapus hambatan perdagangan dan mengurangi biaya perdagangan maupun investasi (Debora, 2017).

BRI memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan ekonomi dan politik yang cukup besar bagi Tiongkok. Hal tersebut secara eksplisit dibuktikan dengan perluasan pasar ekspor Tiongkok, promosi Reinminbi (RMB) sebagai mata uang internasional, dan pengurangan gesekan perdagangan (seperti masalah tarif dan biaya transportasi) (China Power Team, 2017). Menghubungkan infrastruktur dengan negara-negara lainnya dapat membantu untuk memangkas waktu pengiriman dan biaya transportasi. Selain itu, menghubungkan infrastruktur dengan negara lainnya dapat membantu meminimalisir hambatan peraturan dari berbagai barang yang diperdagangkan. Dengan adanya inisiatif ini, Tiongkok juga dapat dengan mudah untuk mendorong pertumbuhan di provinsi bagian barat yang berpenghasilan rendah, dengan cara membangun konektivitas perdagangan dengan negara-negara di kawasan Asia Tengah. BRI akan memberikan keuntungan yang cukup besar bagi Tiongkok dalam bidang ekonomi, di mana dapat membantu mengarahkan sebagian besar aliran ekonomi dunia ke Tiongkok. Hal tersebut di sebabkan karena meningkatnya jumlah perdagangan, investasi, dan juga konektivitas antara Tiongkok dengan negara-negara di kawasan Eurasia akan membuat negara-negara yang terlibat tersebut meningkatkan ketergantungannya pada ekonomi Tiongkok.

2. Peningkatan Kekuatan Militer Tiongkok

Kuatnya keinginan Tiongkok untuk menyeimbangkan pengaruh Amerika di kawasan Indo-Pasifik dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi disebut-sebut telah mendorong Tiongkok untuk meningkatkan anggaran militernya (Sihombing, 2012). Namun, alasan tersebut telah dibantah oleh Perdana Menteri Wen Jia-bao. Menurutnya, pemerintah meningkatkan anggaran militer dengan alasan untuk mengamankan wilayah kedaulatan Tiongkok dari sengketa wilayah dari negara-negara tetangganya. Dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dan didukung dengan kekuatan militer yang kuat, Tiongkok berusaha membuktikan bahwa negaranya mampu mengimbangi pengaruh AS di kawasan Indo-Pasifik.

Dengan keuntungan yang didapatkan dari kegiatan ekonomi yang cukup pesat, Tiongkok secara langsung memiliki alokasi dana yang cukup besar untuk menopang kekuatan militernya. Hal tersebut dilakukan karena upaya Tiongkok untuk menunjukkan pengaruh dan kekuatannya sebagai negara yang besar, tidak cukup hanya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Maka dari itu, Tiongkok juga berusaha meningkatkan kekuatan dan kapabilitas militernya. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat tersebut, Tiongkok dapat dengan mudah untuk melakukan modernisasi persenjataan maupun meningkatkan profesionalitas pasukan militer mereka. Kondisi perekonomian Tiongkok yang cukup pesat dapat mendukung proses *military build-up* dan *arms build-up* dalam militernya. Sebaliknya, peningkatan kekuatan militer dan pertahanan dapat digunakan untuk menjamin keamanan internal maupun eksternal bagi kelangsungan aktifitas ekonomi suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi yang baik menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong suatu negara untuk meningkatkan anggaran militernya (Smith, 2010). Berdasarkan dokumen resmi pertahanan Tiongkok tahun 2008, disebutkan bahwa alasan peningkatan anggaran pertahanan dan militer di dasarkan atas kesinambungan kebutuhan pertahanan dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu peningkatan anggaran militer dan pertahanan Tiongkok disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Tiongkok mulai meningkatkan anggaran pertahanannya dengan dasar pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dimulai sejak tahun 1998 hingga tahun 2007. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan keamanan di wilayah kedaulatan Tiongkok dan untuk membantu memperlancar pembangunan di negara tersebut (Crane, 2005).

Keseriusan Tiongkok dalam meningkatkan kapabilitas militernya tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan anggaran militer dari tahun ke tahun sebesar 20% terhitung dari tahun 2010 hingga 2017. Dalam hal ini, perkembangan ekonomi yang cukup pesat dan dibarengi dengan peningkatan kapabilitas militer dapat dijadikan alat bagi Tiongkok untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negaranya dari ancaman negara lain, sekaligus dapat dijadikan salah satu cara untuk dapat dengan mudah menanamkan pengaruh atau dominasinya ke negara lain.

Peningkatan anggaran militer Tiongkok pada tahun 2011 hingga 2015 telah menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011, anggaran militer negara tersebut mencapai 119,8 miliar dolar AS. Pada tahun 2015, anggaran militer Tiongkok berada pada kisaran 200 miliar dolar AS. Anggaran militer Tiongkok dalam kurun waktu

tersebut telah mengalami peningkatan sekitar 18,75% per tahun. Jumlah anggaran militer Tiongkok pada tahun 2015 telah melampaui anggaran dari semua 12 negara di kawasan Asia-Pasifik (Satrio, 2015). Meningkatnya anggaran militer Tiongkok tersebut telah membuktikan bahwa Tiongkok mempunyai “*bargaining position*” yang dapat diperhitungkan dan dapat mengimbangi dominasi AS di kawasan Indo-Pasifik, tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga dalam bidang kekuatan militer.

Dalam perkembangannya, Tiongkok berusaha untuk meningkatkan keterlibatannya untuk berpartisipasi lebih aktif lagi dalam urusan keamanan internasional (Sullivan & Erickson, 2015). Tiongkok menyampaikan niatnya untuk menghadapi berbagai ancaman maupun permasalahan yang terjadi di luar daerah perbatasannya. Hal tersebut berupa isu mengenai terorisme, pembajakan, penanggulangan bencana alam, hingga masalah perdamaian. Tiongkok mencoba berkomitmen untuk berkontribusi dalam perdamaian dunia dan pembangunan. Mulai tahun 2015, Pemerintah Tiongkok gencar melakukan perundingan dengan sejumlah negara di Afrika untuk membangun pangkalan militer pertama Tiongkok yang ada di luar negeri. Fasilitas logistik untuk kapal-kapal Angkatan Laut Tiongkok coba dibangun untuk melaksanakan operasi anti-pembajakan di kawasan lepas pantai timur Afrika tersebut (BBC News Indonesia, 2015).

Selain membangun pangkalan militernya di kawasan Afrika, Tiongkok juga berusaha untuk membangun pangkalan militer di kawasan Asia Selatan. Tiongkok berusaha untuk membangun pangkalan Angkatan Laut di Gwadar, Pakistan. Tiongkok memanfaatkan proyek BRI untuk dapat memperluas hak atas laut dan darat. Dengan alasan

tersebut, Tiongkok juga dapat mengamankan jalur yang dilalui oleh proyek BRI tersebut.

Di bawah proyek BRI, Tiongkok berusaha meningkatkan kerja sama militernya dengan sejumlah negara yang terlibat dalam proyek BRI tersebut (Chandran, 2018). Salah satunya, Tiongkok meningkatkan kerja sama militernya dengan Pakistan. Kerja sama antar kedua negara tersebut meliputi kerja sama untuk memproduksi jet tempur dan sejumlah perangkat keras militer lainnya. Tiongkok dan Pakistan sepakat untuk membangun sejumlah pabrik baru di Pakistan untuk memproduksi jet tempur dan perangkat keras militer lainnya.

C. Ancaman Kekuatan Tiongkok

Tiongkok merupakan salah satu negara yang memiliki perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Perkembangan tersebut telah dimulai pada masa pemerintahan Den Xiaoping, di mana pasar bebas dan nilai-nilai kapitalisme coba diadopsi. Xiaoping juga mencoba untuk melakukan modernisasi perekonomian Tiongkok melalui *Open Door Policy*. Kebijakan tersebut telah berhasil membawa Tiongkok untuk meningkatkan perkembangan perekonomian negaranya (Chow, 2004). Sejak saat itu, Tiongkok berusaha melakukan modernisasi pada kekuatan militer mereka dalam empat arah, yaitu; meningkatkan dana untuk pertahanan dan belanja alutsis sebesar 2 persen dari PDB, mereformasi industri pertahanan dengan menggunakan teknologi serta berusaha mengembangkan industri militer, membangun kekuatan militer yang lebih meluas, dan arah yang terakhir adalah melakukan modernisasi pasukan militer dengan meningkatkan gaji personel militer dan meningkatkan kondisi kehidupan mereka (Bitzinger, 2011).

Dengan keuntungan yang didapatkan dari kegiatan ekonomi yang cukup pesat tersebut, Tiongkok secara tidak langsung memiliki alokasi dana yang cukup besar untuk menopang kekuatan militernya. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya Tiongkok untuk menunjukkan pengaruh dan kekuatannya sebagai negara yang kuat, tidak cukup hanya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Maka dari itu, Tiongkok juga berusaha meningkatkan kekuatan dan kapabilitas militernya. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat tersebut, Tiongkok dapat dengan mudah untuk melakukan modernisasi persenjataan maupun meningkatkan profesionalitas pasukan militer mereka. Keseriusan Tiongkok dalam meningkatkan kapabilitas militernya dibuktikan dengan adanya peningkatan anggaran militer dari tahun ke tahun sebesar 20% terhitung dari tahun 2010 hingga 2017.

Dengan kekuatan ekonomi dan militer yang dimiliki oleh Tiongkok tersebut, selama beberapa dekade terakhir ini, Tiongkok telah membuat sejumlah terobosan yang cukup signifikan ke wilayah Samudera Hindia. Hal tersebut dilakukan tidak hanya dengan membangun hubungan yang erat dengan sekutu lamanya, namun juga dengan sejumlah negara lain seperti Sri Lanka dan Madagaskar, serta negara-negara lain seperti Maladewa, Seychless, dan Komoros.

Pada Agustus tahun 2017, Tiongkok juga telah membuka basis militer luar negeri pertamanya di Djibouti. Tak hanya sampai disitu saja, Tiongkok juga berusaha melebarkan sayapnya untuk membangun pangkalan militer di kawasan lainnya. Hal tersebut tentu saja akan mempermudah Tiongkok untuk mencapai kepentingan inisiatif *Belt and Road*.

Tidak hanya pengaruh Tiongkok yang semakin meluas ke sejumlah wilayah lain, namun kuatnya pilar

ekonomi dan militer yang dimiliki oleh negara tersebut telah mendorong Tiongkok untuk muncul sebagai aktor baru yang berperan di kawasan (Das & Pant, 2018). Saat ini, pengaruh Tiongkok tidak hanya terlihat dominan di kawasan Asia Timur, namun juga di kawasan Indo-Pasifik. Tiongkok juga sering kali terlibat konflik maupun sengketa dengan sejumlah negara. Salah satu negara yang terlibat sengketa dengan Tiongkok adalah India. Kedua negara tersebut terlibat sengketa perbatasan, selain itu isu mengenai munculnya “poros Tiongkok-Pakistan” juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi India.

Tiongkok ingin menjadi kekuatan global yang “normal” dengan menyeimbangkan kekuatan ekonomi dan militernya (Feffer, 2010). Dalam hal ini, perkembangan ekonomi yang cukup pesat dan dibarengi dengan peningkatan kapabilitas militer dapat dijadikan bekal bagi Tiongkok untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negaranya dari ancaman negara lain, sekaligus dapat dijadikan salah satu cara untuk dapat dengan mudah menanamkan pengaruh dan dominasinya terhadap negara lain. Di sisi lain, kekuatan ekonomi dan militer yang dimiliki oleh Tiongkok dapat dianggap menjadi ancaman bagi pihak lain. Apalagi saat ini, Tiongkok menjadi negara yang mempunyai pendapatan PDB terbesar ke-2 setelah AS (International Monetary Fund, 2018). Sedangkan, Tiongkok juga telah mengambil langkah nyata untuk memperkuat kekuatan militernya dengan meningkatkan anggaran belanja militer. Menurut laporan, pengeluaran militer Tiongkok pada tahun 2017 telah meningkat sebesar 110 persen sejak tahun 2008 lalu (Tian, Fleurant, Kuimova, Wezeman, & Wezeman, 2018). Hal tersebut telah berhasil membawa Tiongkok menduduki peringkat ke-2 setelah AS, sebagai negara yang paling banyak melakukan belanja militer.

D. Kekuatan Aliansi Jepang-Quad

Jepang, AS, India, dan Australia ingin menunjukkan potensi mereka sebagai negara demokrasi yang besar dan mengambil peran untuk mengamankan kawasan Indo-Pasifik. Dialog keamanan tersebut memang tidak mengarah pada kerja sama yang dapat membentuk suatu lembaga multilateral ataupun sebuah aliansi militer, namun kerja sama tersebut dapat menjadi sebuah “pengelompokan kekuatan” yang dapat mencegah munculnya hegemoni regional Tiongkok (Lintner, 2018).

Keempat negara tersebut telah menyatakan komitmennya untuk menciptakan skema untuk berinvestasi di negara-negara kawasan Indo-Pasifik dalam upaya untuk melawan pengaruh yang terus berkembang dari Tiongkok. AS telah menjanjikan era baru keterlibatan dan berjanji untuk “menentang” negara mana pun yang berusaha mendominasi wilayah Indo-Pasifik. AS telah mengeluarkan dana sedikitnya 86 juta Euro untuk pembangunan infrastruktur. Namun, bantuan AS tersebut telah dikerdilkan oleh Tiongkok yang berkomitmen untuk membangun pelabuhan, jembatan, jalan, kereta api, dan jaringan komunikasi di seluruh dunia. Langkah AS tersebut mengikuti ketegangan yang meningkat dengan Tiongkok.

Australia juga berkomitmen untuk membantu mendanai jaringan komunikasi Pasifik Selatan untuk mencegah Tiongkok membangun jalur komunikasi yang diprakarsai oleh raksasa perusahaan telekomunikasi Tiongkok, Huawwei. Australia berpendapat bahwa skema investasi tersebut akan mempromosikan “Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, inklusif, dan makmur”. Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop juga menyatakan bahwa Australia, AS, Jepang, dan India telah memperkuat kemitraan quadrilateral untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur, mengatasi tantangan pembangunan,

meningkatkan konektivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemitraan quadrilateral tersebut merupakan pengakuan bahwa dibutuhkan lebih banyak dukungan untuk meningkatkan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik. Blok Quad tersebut berusaha untuk menyeimbangkan ekonomi dengan Tiongkok. Keempat negara juga telah berkomitmen untuk membentuk kemitraan keamanan empat arah, yang secara luas dilihat sebagai upaya untuk menahan ambisi Tiongkok yang semakin kuat (Pearlman, 2018).

Komitmen keempat negara untuk menghadapi dominasi Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik sangat kuat. Masing-masing negara quad telah mengambil langkah strategis guna menghadapi ambisi Tiongkok dalam mewujudkan proyek BRI nya tersebut. Jepang dan India bersama-sama mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan, Jepang juga bergabung dengan India untuk memperluas Pelabuhan Chabahar di Iran, Jepang dan India juga akan bersama-sama memperluas Pelabuhan Trincomalee di Sri Lanka bagian timur, selain itu kedua negara juga telah berkomitmen untuk mengembangkan Pelabuhan Dawei di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar.

Menurut Jain (Jain, 2017), kuatnya tekad keempat negara dalam menghadapi langkah Tiongkok tersebut dapat memberikan dampak bagi negara-negara di kawasan, dampak tersebut antara lain:

1. Tidak ada lagi negara tertentu yang dapat mengklaim hak atas kekayaan lautan atau sumber daya tertentu.
2. Tidak ada intimidasi terhadap negara-negara kecil.
3. Quad dapat memberikan alternatif pembangunan terhadap negara-negara lain atas bantuan Tiongkok.
4. Jika negara-negara Blok Quad berhasil mewujudkan kerja sama dalam memberikan bantuan infrastruktur,

maka akan dapat mengurangi pengaruh Tiongkok secara global.